

RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Metro (LPPD) Kota Metro adalah ringkasan laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Wali Kota Metro kepada Pemerintah Pusat, yang dipublikasikan melalui media cetak dan/ atau media elektronik di daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintahan daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dipublikasikan melalui media cetak dan/ atau media elektronik di daerah yang merupakan kewajiban Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Kota Metro, yang dihimpun dari realisasi capaian setiap OPD pengampu urusan dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan pemerintah pusat, mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, sebagai bentuk perwujudan implementasi kebijakan, program dan kegiatan yang telah diselenggarakan selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

I.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;

II. GAMBARAN UMUM.

Secara astronomis Kota Metro terletak antara $5^{\circ} 6' - 5^{\circ} 8'$ Lintang Selatan dan antara $105^{\circ} 17' - 105^{\circ} 19'$ Bujur Timur dengan luas wilayah 73,21 Km² dengan ketinggian 25 - 75 m di atas permukaan laut dengan kemiringan 0% sampai 3%, suhu udara berkisar antara 260 - 330 C. Merupakan tanah dataran yang terdiri dari areal persawahan dan permukiman serta tempat-tempat pelayanan dan jasa.

Luas Kota Metro sesuai dengan dasar pembentukannya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 yaitu 68,74 Km² terbagi atas 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan selanjutnya diperbaharui dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2016 tentang Peta Tapal Batas, yang menetapkan luas wilayah Kota Metro seluas 73,21 Km².

Secara administratif batas-batas wilayah Kota Metro adalah :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Penduduk Kota Metro terdiri dari berbagai ragam suku bangsa yang menunjukkan keragaman budaya dan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang seiring perkembangan Kota Metro secara berdampingan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa dan norma agama dengan jumlah penduduk sebesar 178.381 jiwa, dengan rata-rata kepadatan penduduk 2.887 jiwa/km².

III. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA METRO TAHUN 2021 - 2026

Sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 bahwa visi pembangunan dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Menjalankan hal tersebut, kemudian ditetapkan visi pembangunan Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah Visi Misi Kepala Daerah Kota Metro adalah *"Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya"*

Dalam rangka mencapai Visi *"Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya"*, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.
2. Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.
3. Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
4. Misi 4 : Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif.
5. Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat.

Arah Kebijakan Pembangunan

Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka pemulihan kondisi sosial ekonomi akibat pandemic COVID-19	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar serta pembangunan sumberdaya manusia	Meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat berbasis pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas	Pemantapan pembangunan sumberdaya manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berbudaya dan berakhlak mulia.	Pemantapan pembangunan di seluruh bidang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera

Berpedoman pada kebijakan pusat maupun provinsi dengan tetap menyesuaikan kondisi Kota Metro serta pencapaian indikator sasaran pembangunan RPJMD 2021-2026, maka Tema Pembangunan Kota Metro Tahun 2023 adalah “MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN DAYA SAING MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN” dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Masyarakat sejahtera didefinisikan sebagai masyarakat yang produktif sehingga mampu memenuhi kebutuhan sosial, material dan spiritual
- b. Masyarakat berdaya saing didefinisikan sebagai masyarakat yang memiliki keunggulan komparatif, mandiri dan terbuka dengan tetap memegang teguh nilai-nilai budaya dan agama.
- c. Pembangunan yang merata didefinisikan sebagai pembangunan yang dilaksanakan secara optimal di seluruh wilayah sesuai dengan peruntukan ruang sehingga kehidupan sosial dan ekonomi dapat berjalan maksimal.

- d. Pembangunan yang berkeadilan didefinisikan sebagai pembangunan yang pro rakyat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan

Dari tema tersebut disusun 4 (empat) prioritas dalam bagan sebagai berikut :

PRIORITAS KE-1: PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	PRIORITAS KE-2 : PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN	PRIORITAS KE-3 : PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)	PRIORITAS KE-4: PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI YANG PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING
1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Perlindungan sosial 4. Pengentasan kemiskinan 5. Kualitas Perempuan dan Anak 6. Prestasi olahraga 7. Kualitas pemuda 8. Pemberdayaan masyarakat 9. Pelestarian kebudayaan 10. Peningkatan literasi masyarakat 11. Memperkuat moderasi beragama 12. Penguatan modal sosial	1. Penguatan konektivitas 2. Pengembangan wilayah 3. Integrasi sistem drainase 4. Persampahan 5. Peningkatan sanitasi masyarakat 6. Peningkatan kualitas gedung yang memiliki fungsi strategis 7. Penyediaan air bersih 8. Penambahan RTH Publik	1. Perencanaan yang profesional 2. Pengelolaan keuangan yang akuntabel 3. Pelayanan publik yang prima 4. Peningkatan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 5. Pelayanan birokrasi yang transparan , professional dan berprinsip keadilan 6. Penguatan system pemerintahan berbasis elektronik	1. Peningkatan produktivitas sector ekonomi 2. Peningkatan nilai tambah 3. Peningkatan daya beli masyarakat 4. Ketahanan pangan 5. Tenaga kerja yang berdaya saing

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Metro Tahun 2023 terhadap RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Metro

No	Misi Walikota Dan Wakil Walikota Pada RPJMD 2021-2026	Prioritas Rkpd 2023	Sasaran	Indikator	Target
1	Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	78,05
2	Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.				

No	Misi Walikota Dan Wakil Walikota Pada RPJMD 2021-2026	Prioritas Rkpdpd 2023	Sasaran	Indikator	Target
3	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas jalan kota	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	92,06
4	Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	4,5
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>), Terhormat, dan Bermartabat.	Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP	67,24

IV. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Pendapatan Daerah Kota Metro Tahun 2023 direncanakan Rp 968.135.968.132,- terealisasi sebesar Rp 962.705.089.225,- atau mencapai 99,44%, penerimaan tersebut diperoleh dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp 285.039.798.994,- terealisasi sebesar 248.048.073.270,58 atau 99,65 %.
2. Pendapatan Transfer ditargetkan Rp 683.096.169.138,- terealisasi 678.479.372.304,- atau 99,32 %.
3. Pendapatan Lain-Lain Daerah yang Sah, terealisasi Rp 177.643.680,42

Belanja Daerah direncanakan Rp 983.341.143.597,- dengan realisasi Rp 983.341.143.597,- atau mencapai 96,10%, yang dialokasikan untuk :

1. Belanja Operasi, ditargetkan Rp 902.846.911.965,- terealisasi Rp 876.571.415.695,- atau mencapai 97,09%.
2. Belanja Modal, ditargetkan Rp 117.007.628.749,-, terealisasi 104.766.933.126,- atau mencapai 89,54 %
3. Belanja Tidak Terduga ditargetkan Rp 2.000.000.000,- terealisasi 598.276.739,- atau mencapai 29,91 %

4. Belanja Transfer ditargetkan Rp 1.420.000.000,- terealisasi Rp 1.404.518.037,- atau mencapai 98,91 %

Defisit Anggaran Pendapatan dan belanja daerah ditutup dari pembiayaan Netto sebesar Rp 55.176.986.645,- terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 59.176.986.645,- dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 4.000.000.000,-

V. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 2023 BERDASARKAN URUSAN.

1. Penyelenggaraan Urusan Wajib

- a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan, dengan Anggaran sebesar Rp 177.177.616.413,00,- Realisasi Rp 174.014.436.108,00,- (98,21%)
- b. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan, dengan Anggaran sebesar Rp 343.221.061.270,00,- Realisasi Rp 337.903.355.084,00,- (98,45%)
- c. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan Anggaran sebesar Rp 79.401.635.461,00,- Realisasi Rp 68.081.332.649,00,- (85,74%)
- d. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan Anggaran sebesar Rp 10.357.273.904,00,- Realisasi Rp 9.930.331.954,00,- (95,88%)
- e. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan Anggaran sebesar Rp 21.350.233.549,00,-, Realisasi Rp 20.841.196.810,00,- (97,62%)
- f. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial, dengan Anggaran sebesar Rp 5.093.068.611,00,-, Realisasi Rp 4.825.424.420,- (94,74%)
- g. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja, dengan Anggaran sebesar Rp 4.650.850.859,-, Realisasi Rp 4.447.489.387,00,- (95,63%)
- h. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Anggaran sebesar Rp 6.435.879.230,00,-, Realisasi Rp 6.033.791.932,00,- (93,75%)
- i. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup, dengan Anggaran sebesar Rp 16.780.288.776,00,-, Realisasi Rp 16.412.364.501,00,- (97,81%)
- j. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan, dengan Anggaran sebesar Rp 100.000.000,00,-, Realisasi Rp 98.915.000,00,- (98,92%)

- k. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan, dengan Anggaran sebesar Rp 13.770.781.525,00,-, Realisasi Rp 13.356.031.128,00,- (96,99%)
- l. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Anggaran sebesar Rp 6.094.287.723,00,-, Realisasi Rp 5.877.489.691,- (96,44%)
- m. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan Anggaran sebesar Rp 1.148.361.850,00,-, Realisasi Rp 1.124.262.854,00,- (97,90%)
- n. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan Anggaran sebesar Rp 2.930.522.800,00,-, Realisasi Rp 2.451.706.823,00,- (83,66%)
- o. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan, dengan Anggaran sebesar Rp 18.797.809.231,00,-, Realisasi Rp 18.443.130.911,00,- (98,11%)
- p. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika, dengan Anggaran sebesar Rp 15.869.323.362,00,-, Realisasi Rp 15.531.137.114,00,- (97,87%)
- q. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik, dengan Anggaran sebesar Rp 60.000.000,00,-, Realisasi Rp 59.731.170,00,- (99,55%)
- r. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian, dengan Anggaran sebesar Rp 177.589.150,00,-, Realisasi Rp 163.432.133,00,- (92,03%)
- s. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan Anggaran sebesar Rp 5.794.412.344,00,-, Realisasi Rp 5.595.343.286,00,- (96,56%)
- t. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal, dengan Anggaran sebesar Rp 6.607.033.924,00,-, Realisasi Rp 6.379.114.184,00,- (96,55%)
- u. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga, dengan Anggaran sebesar Rp 15.531.629.741,00,-, Realisasi Rp 15.080.546.884,00,- (97,10%)
- v. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan, dengan Anggaran sebesar Rp 1.219.936.300,00,-, Realisasi Rp 1.169.880.607,00,- (95,90%)
- w. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan, dengan Anggaran sebesar Rp 5.074.079.327,00,-, Realisasi Rp 4.824.464.996,00,- (95,08%)

- x. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan, dengan Anggaran sebesar Rp 322.470.700,00,-, Realisasi Rp 306.892.500,00,- (95,17%)
2. URUSAN PILIHAN, terbagi atas :
- a. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan, dengan Anggaran sebesar Rp 595.746.800,00,-, Realisasi Rp 586.781.521,00,- (98,50%)
 - b. Urusan Pilihan Pariwisata, dengan Anggaran sebesar Rp 2.555.455.300,00,-, Realisasi Rp 2.514.438.594,00,- (98,39%)
 - c. Urusan Pilihan Pertanian, dengan Anggaran sebesar Rp 6.627.605.900,00,-, Realisasi Rp 6.452.632.533,00,- (97,36%)
 - d. Urusan Pilihan Perdagangan, dengan Anggaran sebesar Rp 6.977.978.186,00,-, Realisasi Rp 6.766.044.633,00 (96,96%)
 - e. Urusan Pilihan Perindustrian, dengan Anggaran sebesar Rp 308.541.700,00,-, Realisasi Rp 305.858.917,00 (99,13%)
3. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG, terbagi atas :
- a. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, dengan Anggaran sebesar Rp 49.634.017.642,00,-, Realisasi Rp 47.906.456.196,00,- (96,52%)
 - b. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan, dengan Anggaran sebesar Rp 15.636.205.771,00,-, Realisasi Rp 14.126.781.357,00,- (90,35%)
 - c. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan, dengan Anggaran sebesar Rp 8.993.456.139,00,-, Realisasi Rp 8.520.507.314,00,- (94,74%)
 - d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan, dengan Anggaran sebesar Rp 51.998.958.816,00,-, Realisasi Rp 47.788.632.143,05,- (91,90%)
 - e. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, dengan Anggaran sebesar Rp 12.874.264.200,00,-, Realisasi Rp 12.300.767.986,00,- (95,55%)

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME TAHUN 2023

Urusan	IKK Outcome	Capaian
Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	98,5416667
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	100
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	98,776146
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100
Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	5,6015104
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	96,7438084
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	100
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai	100
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi		0
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		77,6155072
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan		96,7923252
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		98,5250613
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota		100
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota		83,7391029
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		11
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100
	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	0
	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,309395
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1,9465365
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	96
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	9,1	
Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100

Urusan	IKK Outcome	Capaian
Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	85,7142857
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	59,1886213
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	77192985292
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur	90,0232019
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar	54,1755889
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,8198338
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	9,387688
Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	100
Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	97,5223178
	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0
	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah	0
	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100
	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0
Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	62,15
	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	90,6045663
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU	12
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	100,7023092
	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	103,2581831
	Kepemilikan akta kelahiran	104,4452669
	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100
Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	0
	Persentase peningkatan status desa mandiri	0
	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,1
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	72,9999193
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	4,6015984
Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	21
	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,43
Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas	100
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	7,0841143
Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	14,0449438
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasusaha	100
Penanaman	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	10,6746167
Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	4,4794101
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	1,602371
	Peningkatan prestasi olahraga	11
Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100
	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100

Urusan	IKK Outcome	Capaian
Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	56,4341085
Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100
Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	65,31
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	92,86
Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	47,4
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan	44,96
Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	96,1441314
Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	39,870951
	Tingkat hunian akomodasi	63,0149264
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,7436323
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3,1939411
Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun	581,1112995
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis	-98,8764045
Kehutanan		1
Energi dan	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0
Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	90,9090909
	Persentase kinerja realisasi pupuk	52,8852402
	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	39,1363023
Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	5,5986696
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	60,1
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri	0
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1
Transmigrasi		0
Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	31,4151662
	Rasio PAD	29,5051856
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	83,1983719
	Opini Laporan Keuangan	10
Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani	0
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	99,5502348
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	55,0994946
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi	79,0353767

Urusan	IKK Outcome	Capaian
Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	39,9030234
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	24,0151106
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100
Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	7,6673572
	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	20,7653035
	Manajemen Aset	4
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,7573
Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	74,4721179
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	66,6666667

VI. CAPAIAN KINERJA DI BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian Empat Belas Kali berturut-turut dari tahun 2010 s.d 2023.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mendapat nilai 68,48 Kategori B .
3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2021 mendapat nilai 2,88 atau sedang, Nilai Tahun 2022 sebesar 3,4465 atau tinggi.
4. Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah mencapai 29,5%

VII. CAPAIAN KINERJA MAKRO

1. Indeks Pembangunan Manusia

Sejak tahun 2010 Kota Metro memiliki status pencapaian yang tinggi dengan nilai di atas 70. Selama 10 tahun terakhir pada umumnya menduduki tertinggi kesatu atau kedua di Provinsi Lampung. Untuk kategori kecepatan, Kota Metro mengalami pertumbuhan angka IPM terendah atau paling lambat di Provinsi Lampung. Hal ini salah satunya disebabkan status pencapaian yang sudah tinggi. Pencapaian indeks pembangunan manusia pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 79,85 meningkat sebesar 0,592 dari pencapaian tahun 2022 sebesar 79,38.

2. Angka Kemiskinan

Garis kemiskinan bertambah sekitar 4 sampai dengan 5 persen setiap tahunnya, walaupun demikian tingkat kemiskinannya dapat dipertahankan untuk selalu turun. Dimana pada tahun 2023 menjadi 7,28%.

3. Angka Pengangguran

Angka pengangguran atau masyarakat yang memiliki penghasilan rendah bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang belum bekerja atau menganggur dikarenakan untuk mencukupi kebutuhannya tidak mencukupi. Angka belum/tidak bekerja di Kota Metro pada tahun 2023 sebesar 3,60%.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kota Metro selama 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang baik dan selalu berada di atas rata-rata Provinsi Lampung dan Nasional. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di Kota Metro sebesar 4,86%.

5. Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB Kota Metro atas dasar harga berlaku selama 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, terakhir pada tahun 2023 mencapai Rp 45.237.000.

6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Metro tahun 2023 dihitung dengan pendekatan koefisien gini (gino ratio) menunjukkan hasil 0,289 yang bila dilihat dari batasan yang diberikan H.T. Oshima menginformasikan bahwa Kota Metro mempunyai tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dengan kategori rendah

Capaian Kinerja Makro menggunakan Indikator Kinerja Makro
Kota Metro

NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2023	LAJU KINERJA 2023	SATUAN
1	Indeks Pembangunan Manusia	Laju Indeks Pembangunan Manusia	79,38	79,85	0,592	%
2	Angka Kemiskinan	Laju Angka Kemiskinan	7,87	7,28	-7,497	%
3	Angka Pengangguran	Laju Angka Pengangguran	4,34	3,6	-17,051	%
4	Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,5	4,86	8	%
5	Pendapatan Per-Kapita	Laju Pendapatan Per-Kapita	42001	45237	7,705	%
6	Ketimpangan Pendapatan	Laju Kelimpangan Pendapatan	0,299	0,289	-3,344	%

VIII. PRESTASI ATAU PENGHARGAAN YANG DIRAIH TAHUN 2023

1. Penghargaan Parahita Ekapraya 2023 dari Kementerian PPPA, 19 Desember 2023.
2. Pemberian Predikat Kepatuhan Tinggi Penilaian Kepatuhan penyelenggraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dari OMBUDSMAN RI, 19 Desember 2023.
3. Penghargaan Kota Pelaksana Program Smart City 2023 (Forum Smart City Nasional pemeran dan awarding Gerakan Menuju Smart City Tahun 2023) Kementerian Komunikasi dan Informatika, 7 Desember 2023.
4. Penghargaan Predikat tertinggi Ramah Anak : Pusat pemelajaran Keluarga (PUSPAGA) Keluarga Harapan (GAHARU) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 7 Desember 2023.
5. Penghargaan Standardisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) SLB Insan Madani Metro, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 7 Desember 2023.
6. Keberhasilan Kota Metro dalam mencapai predikat Sistem Merit BAIK dan Predikat Kualitas Pengisian JPT BAIK Komisi Aparatur Sipil Negara 1 Desember 2023.

7. Penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat katagori Padapa Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, 28 November 2023.
8. Penghargaan Pemerintah Daerah yang Berperan Aktif Mendukung Gerakan Sadar lalu Lintas Usia Dini (SALUD) Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, 16 November 2023.
9. Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Bidang Agama, Sosial dan Budaya; a.n. Baskoro Wicaksono, S.Pd. Kementerian Pemuda dan Olahraga, 19 Oktober 2023 .
10. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional : SDN 11 Metro Pusat Kementerian Lingkungan Hidup, 17 Oktober 2023.
11. Medali Perak Mata Pelajaran Biologi Terintegrasi Tingkat Madrasah Aliyah (MA) dalam Kompetisi Sains Madrasah Nasional (KSM) tingkat Nasional a.n. Ilham Fikri Hamdani Kementrian Agama,7 September 2023 .
12. Medali Emas pelajar Matematika Terintregasi Tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dalam Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tingkat Nasional a.n. Maliqi Radiya Hakim, Kementerian Agama, 7 September 2023
13. Medali Perunggu Wushu Sanda Kelas 60 Kg Junior Putra POPNAS 2023 Kemenpora. 4 September 2023 .
14. Medali Perunggu Wushu Sanda Kelas 48 Kg Junior Putri POPNAS 2023. Kementrian pemuda dan olahraga 4 September 2023.
15. Medali Perak JUDO POPNAS 2023. Kemetrian pemuda dan olahrga , 4 September 2023 .
16. Medali Perunggu Panahan Mix Tim POPNAS 2023. Kementrian, 4 September 2023.
17. Medali Perak Pencak Silat Kelas E PONPAS 2023.kementrian pemuda dan olahraga 4 September 2023 .
18. Penghargaan nominasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota yang berkinerja terbaik sekawasan Sumatera. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 31 Agustus 2023.
19. Penghargaan Kejar Awards 2023 Kategori Wilayah Kabupaten/Kota yang Berperan Aktif dalam Mendorong Budaya Menabung Otoritas Jasa Keuangan, 28 Agustus 2023.

20. Penghargaan Kejar Awards 2023 Kategori Satuan Pendidikan Berbasis agama: SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Metro, Otoritas Jasa Keuangan, 20 Agustus 2023.
21. Juara I Lomba Desa/Kelurahan tingkat regional Tahun 2023 (Kelurahan Yosorejo). Kementerian Dalam Negeri 15 Agustus 2023.
22. Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha tahun 2023 (Walikota Metro) atas kontribusi luar biasa diberikan oleh tokoh-tokoh daerah dalam memajukan pemerintahan dan pelayanan publik. Kementerian dalam negeri 15 Agustus 2023.
23. Meraih Perunggu dalam Kategori STC Class AEG Open. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Juli 2023.
24. Medali Emas mengikuti Kelas Combat Tactical Shooting (CTS) 1 Putri Single Rifle putri. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Juli 2023.
25. Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Nindya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 23 Juli 2023.
26. Penghargaan Bagi Ketua TP-PKK bidang pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) Manggala Karya kencana tahun 2023 .BKKBN, 4 Juli 2023.
27. Penghargaan Bagi Bupati/Walikota Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Manggala Karya Kencana Tahun 2023. BKKBN, 4 Juli 2023.
28. Penghargaan Kota Metro telah melaunching Layanan Panggilan Darurat Call Center 112 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 9 Juni 2023.
29. Juara I Tingkat Nasional Lomba Video Reels Keamanan Pangan Asal Hewan (Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro) dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Kementerian Pertanian, RI 7 Juni 2021.
30. Penghargaan 30 Walikota Metro sebagai "Walikota Sahabat Anak" Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, 4 Juni 2023.
31. Penghargaan Daerah Pilot Project Implementasi Dashboard E-KTR. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 31 Mei 2023.

32. Penghargaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kinerja Terbaik di Provinsi dalam “Hasil Pengawasan Kearsipan Berbasis Baik Tahun 2022”. Arsip Nasional Republik Indonesia, 23 Mei 2023.
33. Penghargaan Pembangunan Daerah 2023: 10 besar kategori Perencanaan dan Prestasi Daerah Tingkat Kota. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 9 Mei 2023 .
34. Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). WTP ke-13 berturut-turut. BPK RL, 3 Mei 2023.
35. Penghargaan APBD Tahun 2023 Kota dengan Serapan APBD Sangat Tinggi (34,5 persen). Kementerian Dalam Negeri, 16 Maret 2023.
36. Penghargaan Universitas health coverage (UHC) BPJS kesehatan Kementerian dalam negeri , 14 maret 2023.
37. Kota bebas frambusia, kementrian kesehatan republik indonesia 21 febuari 2023.
38. Akreditasi paripurna RSUD Jenderal Ahmad Yani Komisi Akreditasi RSUD Kota Metro (KARS), 15 Februari 2023.

XI. PENUTUP

Demikian gambaran penyelenggaraan tugas pemerintahan Kota Metro dalam era otonomi luas, khususnya dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan publik.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Metro Tahun 2023 ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sedangkan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/8697/OTDA Tanggal 11 Desember 2023 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan Kota Metro sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang kemampuan Kota Metro dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Disadari sepenuhnya masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam hal penyajiannya, diharapkan dimasa yang akan datang dapat lebih ditingkatkan atas masukan dari semua pihak.

Terima kasih dan semoga bermanfaat.